

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PADA KABUPATEN KONAWE

Nurjanna*)

Abstract : *This study is to find out whether the financial performance of Regional Government of South Konawe Regency in managing regional finances based on financial ratio of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during fiscal year 2013 - 2015. The method of data processing analysis used in this study is Descriptive analysis using the ratio of Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency Ratio, Activity Ratio and PAD Growth Ratio. Data analysis techniques used in this study are the financial ratio at Regional Budget (APBD) South Konawe District Budget Year 2013- 2015. Based on the calculation and analysis of Regional Financial Capability can be concluded, that the condition of financial capacity Kab. Konawe South is still not ideal. Judging from the calculation of share and growth to the Budget Summary of Revenue and Expenditure District. Konawe Selatan Fiscal Year 2013 to 2015, the data obtained Share of 4.25% and Growth of 16.78%, so the position Kab. South Konawe is in quadrant II which means to be in condition not yet ideal.*

Keywords: *Regional Autonomy, Local Government Financial Performance, Revenue And Expenditure Budget, Regional Independence Level*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dimana hasil analisa rasio keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013-2015

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2013-2015. Yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, dimana hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan /perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat di dalamnya. ada tiga hal mendasar yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu adanya kewenangan daerah secara yuridis untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, adanya legitimasi dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan adanya tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan daerahnya.

Dasar hukum

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diatur oleh Hukum. Dasar Hukum yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.
- d) UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- j) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- m) Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Pengertian Pengukuran Kinerja
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

b. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002), antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembang pencapaian strateginya.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai *good congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD meungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran.

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut di sampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Rasio Perhitungan Anggaran

Rasio ini menunjukkan pencapaian target selama satu tahun anggaran. Tingkat pencapaian target ini mencerminkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam menghasilkan output. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dari pendapatan yang diterima (Gede Edy Prasetya 2005:51).

Rasio Pendapatan-Belanja

Rasio ini bertujuan menjaga keamanan kondisi keuangan daerah untuk membiayai belanja operasi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tak perlu terlalu tergantung pada pendapatan dana perimbangan dan pendapatan sah lainnya. Perkiraan ini bisa digunakan/dialokasikan untuk membiayai belanja modal bagi suatu daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah (Abdul Halim 2007:234).

Kelemahan Analisis Rasio

Meski cukup sering digunakan dalam analisis laporan keuangan, kita perlu menyadari kelemahan analisis rasio. Kelemahan analisis rasio pada umumnya terkait dengan faktor karakteristik laporan keuangan itu sendiri. Analisis rasio sangat rentan terhadap kesalahan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa data dalam analisis rasio berasal dari data akuntansi yang juga memiliki kelemahan tersendiri, misalnya mengandung data manipulasi dan kesalahan. Saat melakukan analisis, pengguna juga harus selalu ingat bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya. Selain itu, laporan keuangan memiliki kemungkinan mengandung *window dressing* dan *income smoothing* yang perlu diwaspadai. Jadi dalam menilai baik buruk suatu rasio, analisis harus hati-hati.

Metode Penelitian & Pengolahan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 dan akan dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi APBD, Rasio Aktifitas, dan Menghitung Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembangunan pada Kabupaten Konawe Selatan dan mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 s.d 2015. Yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat

grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 3 (Tiga) tahun.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015. Adapun proses analisisnya sebagai berikut:

- a. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin:69) kriteria kemandirian.

Tabel 1.
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan

Kriteria Kemandirian Keuangan	% Kemandirian
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

- b. Mengitung rasio efektifitas dan efisiensi APBD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan/penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Rasio Efektifitas :

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaan} / \text{Pendapatandaerah}}{\text{TargetPenerimaan} / \text{Pendapatanyangditetapkan}} \times 100\%$$

Kriteria kinerja keuangan yang efektif menurut Medi, 1996 adalah :

Tabel 2.
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Kriteria	% Efektifitas
Sangat Efektif	Keatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang 60%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya} / \text{Pengeluarandaerah}}{\text{Realisasi} / \text{Penerimaandaerah}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan yang efisien menurut Medi,1996 adalah :

Tabel 3.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria	% Efisiensi
Tidak efisien	Keatas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisiensi	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang 60%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

- c. Menghitung rasio aktifitas

Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{TotalBelanjaRutin}}{\text{TotalBelanja}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo, 1999 dalam (Widodo:65) Kriteria tingkat belanja rutin dapat dinilai sebagai berikut :

Tabel 4.
Kriteria Tingkat Belanja Rutin

Kriteria	% Tingkat Belanja Rutin
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% - 80%
Kurang Baik	80 - 100%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 5.
Kriteria Tingkat Belanja Pembangunan

Kriteria	% Tingkat Belanja Pembangunan
Kurang Baik	0% - 10%
Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

d. Menghitung rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai periode ke periode berikutnya. Hal ini bermanfaat untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Menurut Anto Dajan (dalam Armayani, 2001:21) pertumbuhan dapat dinilai dengan formulasi dan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = PAD tahun ke-n

P_o = PAD tahun ke n-1

Tabel 5.
Kriteria Tingkat Pertumbuhan

Kriteria	% Tingkat Pertumbuhan
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

Hasil dan Pembahasan

Analisis Rasio Keuangan APBD Kab. Konawe Selatantahun 2013 – 2015

Salah satu cara untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan. Untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penulis tidak hanya melakukan Analisis Kinerja Keuangan Daerah, tetapi juga melakukan Analisis Tingkat Kemandirian keuangan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Dalam melakukan penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, penulis menggunakan perhitungan dari data sekunder Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat setiap tahunnya untuk disajikan secara transparan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Untuk itu, evaluasi terhadap laporan keuangan sangat diperlukan agar Pemerintah Daerah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, dalam Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio Kemandirian

Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Sumber Pendapatan Eksternal	Kemandirian	Pola Hubungan	Kriteria Kemandirian
2013	25.760.478.124	767.587.950.736	3,36%	Instruktif	Rendah Sekali
2014	45.766.897.223	819.799.966.946	5,58%	Instruktif	Rendah Sekali
2015	43.850.458.011	1.011.512.834.701	4,33%	Instruktif	Rendah Sekali
Rata-rata Kemandirian			4,42%	Instruktif	Rendah Sekali

Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu berkisar antara 0%- 25%. Dalam pola hubungan Instruktif, dimana peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel. 10
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2013	25.760.478.124	793.487.279.596	3,25%	Sangat Kurang
2014	45.766.897.223	865.566.864.169	5,29%	Sangat Kurang
2015	43.850.458.011	1.055.373.292.712	4,15%	Sangat Kurang
Rata - rata Derajat Desentralisasi Fiskal			4,23%	Sangat Kurang

Sumber : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 (Data Diolah)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal/Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dalam mendukung penerimaan daerah masih sangat kecil hal ini dapat dilihat pada tabel 10. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama 3 (tiga)

tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan rata-rata sebesar 4,23 %.

c. Rasio Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan normatif data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Potensi Riil Daerah dalam

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio

Efektivitas Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 adalah sebagai berikut

Tabel. 11
Rasio Efektifitas

Tahun	Target Pad	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas	Kriteria Rasio Efektifitas
2013	23.526.727.000	25.760.478.124	109,49%	Sangat Efektif
2014	35.630.762.000	45.766.897.223	128,45%	Sangat Efektif
2015	41.238.991.228	43.850.458.011	106,33%	Sangat Efektif
Rata - rata rasio Efektifitas			114,76%	Sangat Efektif

Sumber : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa capaian/realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 3 tahun selalu berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 114,76 persen. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat efektifitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan termasuk dalam katagori sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatannya terlihat dari rata-rata

capaiannya yang berkreteria sangat efektif.

d. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut

Tabel. 12
Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi penerimaan PAD	Rasio efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi
2013	251.400.000	25.760.478.124	0,98%	Sangat Efisien
2014	350.000.000	45.766.897.223	0,76%	Sangat Efisien
2015	351.550.000	43.850.458.011	0,80%	Sangat Efisien
Rata - rata rasio Efisiensi			0,85%	Sangat Efisien

Sumber : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 (Data Diolah)

Selama kurun waktu 3 tahun Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan dalam merealisasikan penerimaan PAD tidak mengalami perubahan, dan hal ini

ditunjukkan dengan tingkat rasio pada tahun 2013 sampai tahun 2015 berada pada kriteria sangat efisien, hal ini

menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik.

e. Rasio Kesenjangan Belanja/Aktivitas

1. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel.13
Rasio Belanja Rutin

Tahun	Belanja Rutin	Total Belanja APBD	Rasio Belanja Rutin	Kriteria Rasio Belanja Rutin
2013	521.744.761.038	793.487.278.860	65,75%	Cukup Baik
2014	584.588.316.589	865.566.864.169	67,54%	Cukup Baik
2015	610.142.454.095	1.055.373.292.712	57,81%	Cukup Baik
Rata - Rata Rasio Belanja Rutin			63,70%	Cukup Baik

Sumber : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 (Data Diolah)

Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung Kab. Konawe Selatan selama periode 3 tahun sebesar 63,70%. Ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan untuk Belanja Langsung.

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Total Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015, maka Rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut.

Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Tabel. 14
Rasio Belanja Pembangunan

Tahun	Belanja Pembangunan	Total Belanja APBD	Rasio Belanja Pembangunan	Kriteria Rasio Belanja Pembangunan
2013	204.292.017.318	757.065.040.356	26,98%	Cukup Baik
2014	251.994.628.547	920.167.180.936	27,39%	Cukup Baik
2015	253.354.344.389	1.003.732.921.399	25,24%	Cukup Baik
Rata - Rata Rasio Belanja Pembangunan			26,54%	Cukup Baik

Sumber : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013-2015 (Data Diolah)

Dari perhitungan rasio keserasian di atas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kab.

Konawe Selatan masih digunakan untuk kebutuhan belanja rutin walaupun terjadi penurunan dari 67,54% (2014) menjadi

57,81% (2015) dan rata-rata rasio belanja rutin selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2013 - 2015 sebesar 63,70% . Demikian pula rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil, dan mengalami penurunan dari 27,39% (2014) menjadi 25,24% (2015), dan rata-rata rasio belanja pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2013 - 2015 sebesar 26,54%.

f. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 3,979,986,300 mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.179.152.941, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.032.929.564, hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu pada tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum ada pungutan sehingga nilai pendapatannya rendah, sementara pada tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) didapatkan nilai sebesar Rp. 1.742.770.034 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.158.139.076. begitupun masalah BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana pada tahun 2013 masih belum melakukan pemungutan secara resmi sedangkan di tahun 2014 didapatkan nilai pendapatan sebesar Rp.4.562.227.475 dan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 868.435.652. begitupun dengan pajak mineral bukan logam dan batuan dimana pada tahun 2013 sebesar Rp.703.332.062 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.855.155.487 dan kembali menurun pada tahun 2015 sebesar Rp. 202.622.750, hal ini disebabkan oleh beberapa hal dilapangan seperti banyaknya lahan tambang yang

terbuka pada tahun 2014 sedangkan tahun 2015 lahan tambang banyak yang telah diberhentikan atau dicabut izinnya.

2. Hasil Retribusi Daerah

Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2013 sebesar Rp.8.350.584.443 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.10.139.388.713 dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2015 sebesar Rp.2.277.440.822. hal ini disebabkan beberapa hal seperti; Retribusi jasa umum pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.047.749.068, menurun pada tahun 2014 sebesar Rp.6.429.094.613 dan menurun secara signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp.347.725.000. ini disebabkan pada tahun 2013 dan 2014 masih ada retribusi Pelayanan Kesehatan (ASKES, dan Jamkesmas) sedangkan di tahun 2015 Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak termasuk dalam retribusi daerah karena berubahnya aturan dan kebijakan dibidang kesehatan dengan adanya Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS). Begitupun dengan Retribusi Izin Usaha Tertentu dimana pada tahun 2013 sebesar Rp.1.043.920.375 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp.4.226.155.010 sedangkan tahun 2015 menurun kembali sebesar Rp.1.684.896.822 hal ini disebabkan karena di tahun 2014 banyaknya izin usaha tambang yang terbuka sedangkan di tahun 2015 izin tambang banyak yang dicabut kembali izinnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan dimana pendapatan tahun 2013 sebesar Rp. 4.519.772.043 menurun pada tahun 2014 sebesar Rp.4.226.155.010 dan

kembali menurun di Tahun 2015 sebesar Rp.4.108.467.700. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun Pendapatan Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD masih stabil.

4. Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah

Pendapatan lain lain daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 8,910,135,338 mengalami kenaikan signifikan di tahun 2014 sebesar Rp.20,042,200,559 di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.29,431,619,925. Kenaikan secara signifikan ini disebabkan adanya dana transfer dari kapitasi dana JKN pada tahun 2014 sebesar Rp. 10,293,830,100 dan tahun 2015 sebesar Rp.10,097,268,540, ditambah lagi adanya keuntungan dari hasil BLUD RSUD Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp.10,937,155,379.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan tahun 2013-2015 dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kab. Konawe Selatan selama waktu tiga tahun terakhir masih rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat masih tinggi dengan rata-rata kemandirian keuangan selama tiga tahun terakhir mencapai 4,42%.
2. Kinerja APBD Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan tahun 2013-2015 sudah baik., dengan melihat tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata mencapai 4,23%,

rasio efektifitas rata-rata mencapai 114,76%, Rasio efisiensi APBD rata-rata mencapai 0,85%, rasio aktifitas belanja rutin rata-rata mencapai 63,70%, rasio aktifitas belanja pembangunan mencapai 26,54%, rasio pertumbuhan PAD mencapai rata-rata 38,77%, dan rasio pertumbuhan APBD mencapai rata-rata 16,67%. Setiap rasio menunjukkan tingkat pertumbuhan dan peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kab. Konawe Selatan masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015, maka diperoleh data *Share* sebesar 4,25% dan *Growth* sebesar 16,78%, sehingga posisi Kab. Konawe Selatan berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal.

Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan perlu melakukan manajemen pendapatan secara optimal, hal yang harus dilakukan yaitu mengenali sumber-sumber pendapatan daerah termasuk menghitung potensi pendapatan, dan mengelola sumber pendapatan tersebut secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat.

2. Dalam pengelolaan keuangan daerah, seharusnya Pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan lebih fokus pada efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran pada berbagai program dan lebih cermat dalam membelanjakan keuangan dalam merealisasikan belanja APBD, alokasi belanja rutin sebaiknya ditekan, dan sebaliknya alokasi belanja pembangunan makin ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah sehingga ada pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui. 2000, *Teori Akuntansi*. Edisi kelima, Terjemahan Ahmed Riahi, Jakarta: Salemba Empat.
- Sutabri, Tata. 2003, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Wild John J., Subramanyam, dan Halsey F. Halsey. 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Buku satu, Edisi kedelapan, Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2004, *Pengantar Akuntansi*. Buku satu, Edisi kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- . 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Buku dua, Edisi kedelapan, Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kedua, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Prasetya, Edy Gede. 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2002), **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta, ANDI Offset.
- Jumingan. 2005, *Teori Akuntansi*. Edisi kelima, Surakarta: Bumi Aksara.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2006, *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Graha Ilmu.
- . 2006, *Teori Akuntansi*. Buku satu, Terjemahan Ahmed Riahi, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Jurnal Educatio, Vol. 6 No, 2 Desember 2011, hal.57-80
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan.
- *) Penulis adalah Dosen pada STIE Tri Dharma Nusantara Makassar**